

**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NO. 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Komunikasi
Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

M U I S

NIM. 50700109044

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muis
NIM : 50700109044
Tempat/Tgl. Lahir : Peawan, 5 Juni 1990
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin
Alamat : Jl. Muh. Yamin Baru Makassar
Judul : Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar
Dalam Mengimplementasikan UU NO. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa ... Desember 2014
Penyusun,

M U I S
NIM. 50700109044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muis, NIM. 50700109044, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, Gowa 16 Oktober 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Jalil, S.Ksi.,M.Ikom
NIP. 092307302

Dra.Asni Djamareng, M.Si
NIP. 196410131994403200 2

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Salam dan salawat kepada reformis sejati Rasulullah Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 (Strata 1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkontribusi. Karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah mendoakan, membantu dan mendukung penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

1. Bapak Prof.Dr.H.Mustafir Pababbari M.Si Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S, SELAKU Mantan Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr.H.Rasid Masri,S.Ag.,M.Si.,MM, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Serta,para Dosen/tenaga pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Ramsiah Tasruddin,S. Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, dan Dra. Audah Mannan, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, dengan rasa tulus

memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan masukan serta bimbingan selama penulis menempuh kuliah.

4. Abdul Jalil, S.Ksi.,M.Ikom, selaku Pembimbing I, dan Dra.Asni Diamereng, M.Si, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu mengarahkan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Pengelola Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin atas kontribusinya kepada peneliti dalam membantu menyediakan berbagai literatur ilmiah.
6. Kepada seluruh Staff Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
7. Ayahanda Ama dan Ibunda Rama'isa tercinta selaku orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anandanya selama melaksanakan pendidikan
8. Saudara dan Saudariku, Bahtiar, Kusmin, ST, Hiswati, S.Pd, Abd Kadir Tersayang yang telah banyak memberikan bantuan baik morial maupun material selama penulis menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu komunikasi 2009.
10. Rekan-rekan seperjuangan HPMM Kom.Uin Aluiddin Makassar 2013-2014 dan PP- HPMM 2011-2013

Samata, Gowa ... Desember 2014

M U I S

NIM. 50700109044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Strategi Komunikasi	12
B. Efektifitas Komunikasi	16
C. Peran dan Fungsi Hubungan Masyarakat	19
D. Gambaran Umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31

D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Humas Pemerintah Kota Makassar ..	35
B. Strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik ..	43
C. Faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ..	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Administrasi Penelitian ..	65
B. Pedoman Wawancara ..	74
C. Dokumentasi Foto ..	78
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : M U I S
NIM : 50700109044
Judul : Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam
Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Penelitian ini mengangkat tema tentang “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) bagaimana strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik, dan 2) bagaimana faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP).

Untuk menjawab permasalahan yang dimaksud, digunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi lapangan (*field research*) dengan menerapkan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan penggunaan data-data relevan, baik berupa profil Humas Pemerintah Kota Makassar, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), grafis/foto kegiatan Humas Pemerintah Kota Makassar dan sebagainya.

Hasil penelitian ini mengajukan kesimpulan, **Pertama;** Humas Pemerintah Kota Makassar menerapkan strategi komunikasi dalam bentuk perencanaan komunikasi dan penerapan konsep manajemen komunikasi, yaitu, a) Perencanaan, adalah perumusan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan terkait tiga peraturan pelaksanaan UU KIP yang dirumuskan secara bersama lembaga pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar hukum dan konsep pelaksanaan KIP, b) Pengorganisasian atau mengorganisir perangkat kerjanya agar konsep dan strategi komunikasi yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien, c) Pelaksanaan atau implementasi UU KIP dalam aspek pelayanan informasi publik: publikasi informasi proaktif melalui multimedia, dan Publikasi informasi proaktif melalui tatap muka. **Kedua;** Faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan UU KIP antara lain menunjukkan indikasi; a) adanya kecenderungan subjektivitas para pejabat PPID pada tata cara penolakan permintaan informasi serta penetapan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses publik, b) Praktik permintaan dan pelayanan informasi belum sampai pada level kesadaran terhadap adanya hak publik untuk mendapatkan informasi, dan permintaan informasi atau pelayanan cenderung masih dalam kerangka pekerjaan.

Penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi yang perlu ditindaklanjuti, yaitu a) salah satu proses yang menunjang Humas Pemerintah Kota Makassar adalah perlunya koordinasi program lintas sektor sesuai ketentuan peraturan pemerintah pusat dan daerah, b) perlunya diadakan secara rutin pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bako Humas), dimana akses informasi yang dibutuhkan oleh pejabat Humas, PPID serta seluruh elemen masyarakat dapat diperoleh dari pertemuan tersebut, c) penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti lainnya guna kesinambungan kajian tentang peran Humas Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Humas semakin penting dan strategis dalam kinerja pemerintahan. Sebagai komunikator publik, Humas pemerintah harus menjaga citra lembaganya, memberikan pelayanan dan mengkomunikasikan pesan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya.

Selain sebagai komunikator publik, Humas bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional.

Keberadaan Humas pemerintah sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan. Selain memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan, Humas pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005, Pasal 4 dikatakan:

Tugas pokok pranata Humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan ke-Humas-an, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan ke-Humas-an, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan ke-Humas-an.¹

Pejabat Humas perlu memperhatikan bahwa dalam menjalankan aktivitas tugas dan fungsinya, hendaknya mampu memelihara nama baik institusi/lembaga, mampu melakukan pelayanan yang memadai, mampu menjalankan aktivitas yang

¹Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005, Pasal 4

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan informasi. Dalam hal ini, Humas pemerintah menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintah yang akan dan sedang dilaksanakan.

Khususnya dalam mengelola informasi, Humas harus membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik (masyarakat) untuk dapat diakses, kecuali informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di antaranya:

1. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi
9. Memorandum atau surat antar badan publik dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.²

Dalam konteks hubungan masyarakat, pranata Humas berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik serta menjalin hubungan baik dengan *stakeholders*.

²Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cet.1; Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 305-308.

Dengan demikian Humas pemerintah harus membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dengan menunjukkan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif.

Namun kondisi umum yang dihadapi oleh pemerintah khususnya di sektor ke-Humas-an, mengindikasikan suatu permasalahan tentang kurang optimalnya kinerja Humas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dalam Pertemuan Tahunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako-Humas) di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 6 November 2012, mempersoalkan bahwa apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ini.³

Dari sisi struktural kelembagaan, Komisi Informasi baik Pusat maupun Provinsi yang ada baru 18 provinsi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Menurut Tifatul Sembiring, ini akan berdampak dan berkorelasi langsung dengan kinerja Humas yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.

Selain itu, data hasil survey beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri juga mengindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan kenyataan itu, dapat disimpulkan bahwa

³Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika”, *Website Kementerian Komunikasi dan Informatika*, <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/sambutan> (12 Februari 2014).

dalam hal pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang menangani informasi dan komunikasi, perlu mendapat perhatian.

Menyikapi beberapa hasil survey dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai masukan, kritikan yang sering muncul, baik dari masyarakat, LSM, maupun pemerhati transparansi informasi, bahwa Badan Publik Pemerintah/Negara, khususnya Humas pemerintahan, harus memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya sebagai bentuk komitmen Badan Publik dalam menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan hasil identifikasi latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah; bagaimana kinerja Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik?. Adapun sub permasalahan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Fokus Penelitian

Berpijak pada sub permasalahan yang diajukan di atas, maka fokus penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar

dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik, dan faktor penghambat Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik.

2. Deskripsi Fokus

a. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah gabungan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dari strategi komunikasi adalah menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.⁴

b. Humas Pemerintah Kota Makassar

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu unit kerja atau Badan Publik Pemerintah/Negara yang berada di tingkat Kotamadya. Humas pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005. Pasal 4 dikatakan: Tugas pokok pranata Humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan ke-Humas-an, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan ke-Humas-an, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan ke-Humas-an.

c. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) di Indonesia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh

⁴Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek* (Cet. 21; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 32.

Informasi Publik (KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dengan amanat Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan HAM membahas RUU tersebut bersama DPR RI. Pada akhirnya RUU KMIP disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 30 April 2008 menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010.⁵

UU-KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

UU KIP mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.⁶ Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi Bagiankrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

⁵Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya* (Jakarta: Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi, 2012), h. 2.

⁶Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab dari semua pengelola badan publik kepada masyarakat, baik itu badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang publik (Lihat UU No. 14 tahun 2008 Pasal 1, tentang Klasifikasi Badan publik).

D. Kajian Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan hasil perbandingan antara penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang relevan. Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Alauddin 2013, tujuan kajian pustaka dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian yang dimaksud, dan untuk memastikan bahwa:

1. Pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya
2. Pokok masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan sejumlah teori yang telah ada.⁷

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dari mahasiswa yang membahas tentang Hubungan masyarakat (Humas) dengan keragaman perspektif pendekatan teori, metode dan perbedaan ruang lingkup kajian serta lokasi objek penelitian. Adapun empat hasil penelitian mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin yang dimaksud antara lain dijelaskan dalam tabel berikut ini.

⁷Muljono Damopolii, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13-14.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian

Nama Peneliti	Judul / Objek Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Teoretis / Jenis penelitian	Hasil Penelitian
SYATIR (Ilmu Komunikasi FDK UIN 2012)	Peranan Humas Pemerintah Dearah Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bulukumba	Bagaimana aktivitas dan Peranan Humas Pemerintah Dearah dalam mensosialisasikan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba?	Pendekatan teori komunikasi organisasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data <i>library</i> dan <i>field research</i>	Aktivitas Humas Pemda Bulukumba dinilai cukup baik, terutama menyangkut publikasi, monitoring, evaluasi respon masyarakat, mengolah data informasi serta memberikan penerangan kepada masyarakat.
HILNA (Ilmu Komunikasi FDK UIN 2013)	Strategi Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pengembangan Wisata Pantai Marina di Kabupten Bantaeng	Bagaimana strategi Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan faktor-faktor apa yang mendorong pengembangan pariwisata pantai Marina di Kabupaten Bantaeng?	Pendekatan teori komunikasi informasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data <i>library</i> dan <i>field research</i>	Strategi Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah strategi operasional, pendekatan persuasif, edukatif, koordinatif, integratif, tanggung jawab sosial. Faktor pengembangan pariwisata adalah kontribusi ekonomi ke Penghasilan Asli Daerah (PAD), rehabilitasi kawasan sejarah, meningkatkan perekonomian masyarakat.

<p style="text-align: center;">KAMSAR (Ilmu Komunikasi FDK UIN 2013)</p>	<p>Aktivitas Ke-Humas-an Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar Terhadap Pelayanan Informasi Masyarakat Kota Makassar</p>	<p>Bagaimana aktivitas dan faktor-faktor apa yang menghambat kegiatan ke-Humas-an Diskominfo dalam pelayanan informasi?</p>	<p>Pendekatan teori komunikasi dan informasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data <i>library</i> dan <i>field research</i></p>	<p>Program pelayanan informasi Humas Diskominfo antara lain M-CAP dan M-PLIK, layanan media centre, Tabloid Makassar Info. Faktor penghambat adalah jaringan akses internet, tidak adanya buku panduan meteri dan alat dokumentasi laporan, infrastruktur dan SDM.</p>
<p style="text-align: center;">ANDI AGUSRIADY (Ilmu Komunikasi FDK UIN 2014)</p>	<p>Peran HUMAS dan Infokom Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah</p>	<p>Bagaimana peran dan faktor penghambat dan pendukung Humas dan Infokom dalam mensosialisasikan Perda di Kabupaten Bone?</p>	<p>Pendekatan teori komunikasi dan informasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data <i>library</i> dan <i>field research</i></p>	<p>Peran Humas dan Infokom Pemerintah Kabupaten Bone dalam sosialisasi Perda adalah sebagai komunikator dalam proses sosialisasi dengan menggunakan media massa, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Faktor penghambat adalah keterbatasan ruang gerak HUMAS dan faktor pendukung adalah kualitas SDM dan sinergitas media massa.</p>

Sumber: Olah data Kajian Pustaka – hasil penelitian mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Angk. 2012 s/d 2014.

Letak perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian tersebut di atas antara lain pada aspek objek penelitian, yakni peneliti memilih Humas Pemerintah Kota Makassar sebagai objek studi. Sedang fokus analisis yang diketengahkan adalah terkait dengan strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Selain itu peneliti berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik.

Adapun pendekatan teori yang digunakan adalah teori komunikasi yang berkaitan dengan efektifitas komunikasi, teori fungsional organisasi (hubungan masyarakat) dan deskripsi umum tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan aspek metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berorientasi lapangan (*field research*).

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan terdahulu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik.
- b. Mengetahui faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan ilmiah hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi, khususnya penerapan teori strategi komunikasi dalam kinerja Humas pemerintahan.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan positif bagi Pemerintah Kota Makassar, terutama bagi praktisi Humas dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Strategi Komunikasi

Pengertian strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.¹ Sedangkan pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *communicatio*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Arti *communis* disini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Secara terminologis istilah komunikasi berarti proses penyampaian pesan atau suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.²

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas:

- a. *To secure understanding* yakni memastikan bahwa komunikan dapat mengerti komunikasi yang diterimanya
- b. *To establish acceptance* yakni ketika penerima sudah memahami pesan yang sudah diterimanya, maka selanjutnya pesan yang diterima tersebut harus dibina
- c. *To motivate actions* yakni pesan yang diterima kemudian dimotivasikan.³

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka strategi komunikasi adalah gabungan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu

¹Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi; Sebuah Pengantar Ringkas* (Cet. 3; Bandung: Armico, 1984), h. 58-59.

²Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Cet. 3; Jakarta: Grasindo, 2006), h. 5. Lihat juga Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Cet. 7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

³Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 32.

menunjukkan operasionalnya secara praktis, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi.⁴

Menurut Onong Uchjana, strategi komunikasi baik secara makro maupun mikro memiliki fungsi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.⁵

Strategi komunikasi bersifat makro dalam prosesnya berlangsung secara vertikal atau dari atas ke bawah (*top down*). Para komunikator yang berada pada puncak kelembagaan komunikasi, misalnya dalam kelembagaan Negara, apakah dari pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menggunakan media massa maupun media lainnya melalui jenjang hirarki menurun ke bawah, dan juga kadang melalui jenjang dari bawah ke atas (*bottom up*). Dalam kenyataan di lapangan komunikasi melalui jenjang dari bawah ke atas tidak selancar komunikasi yang dilakukan dari jenjang dari atas ke bawah.⁶

Strategi komunikasi dalam kaitannya dengan sistem komunikasi, berbicara mengenai sistem masyarakat dan berbicara tentang manusia. Karena itu pendekatannya dilakukan secara makro dan secara mikro, baik prosesnya secara vertikal maupun horizontal. Secara makro sistem komunikasi menyangkut sistem pemerintah, sedangkan secara mikro menyangkut sistem nilai kelompok. Secara makro menyangkut strategi komunikasi, secara mikro menyangkut operasi komunikasi.

⁴Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 32.

⁵Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 28.

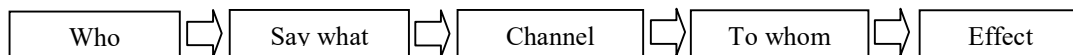
⁶Arifuddin Tike, *Dasar-Dasar Komunikasi; Suatu Studi dan Aplikasi* (Cet, I; Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 2009), h. 57-58.

Dalam hubungannya dengan sistem komunikasi, bila ditinjau secara makro vertikal, jelas di satu pihak sistem komunikasi itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Di lain pihak dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi komunikasi, terutama media elektronik mutakhir, antara lain televisi, video, dan satelit komunikasi.⁷

Banyak teori komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi teori yang memadai untuk dijadikan pendukung strategi komunikasi ialah yang dikemukakan oleh Harold Lasswell bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “*Who Say What In Which Channel To Whom With What Effect*”.⁸

Gambar 2.1

Model Komunikasi oleh Lasswell



- a. *Who* : Siapakah komunikatornya
- b. *Say What* : Pesan apa yang dinyatakan
- c. *In Which Channel* : Media apa yang digunakan
- d. *To Whom* : Siapa komunikannya
- e. *With What Effect* : Efek apa yang diharapkan

⁷Arifuddin Tike, *Dasar-Dasar Komunikasi*, h. 65-70

⁸Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar* (Cet. 12, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 147, Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 46, Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, h. 17, dan Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 30.

Rumus Lasswell ini tampaknya sederhana saja. Tetapi jika dikaji lebih jauh pertanyaan “efek apa yang diharapkan”, secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama. Pertanyaan tersebut ialah:

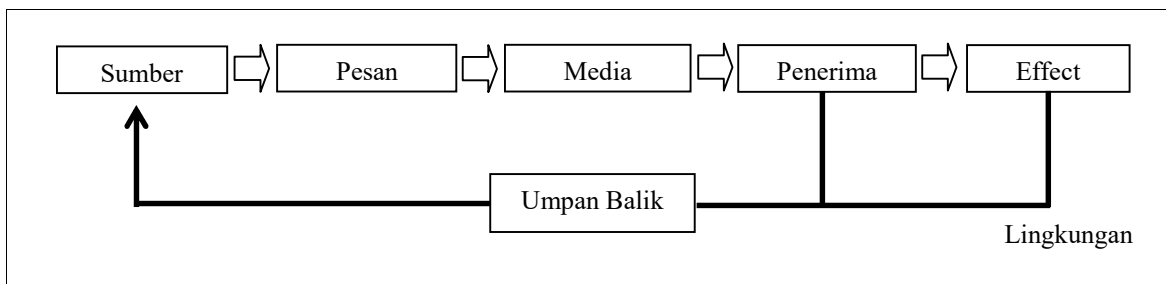
- a. *When* : Kapan dilaksanakannya
- b. *How* : Bagaimana melaksanakannya
- c. *Why* : Mengapa dilaksanakan demikian

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi sangat penting karena pendekatan terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi bisa berjenis-jenis, yakni; *Information, Persuasion, Instruction*.

Dalam perkembangan selanjutnya, model komunikasi Lasswell tersebut di atas dikembangkan oleh Shannon dan Weaver, terutama dalam proses komunikasi elektronika. Selain itu, Miller dan Cherry sebagaimana yang dikutip Schramm dan Hafied Cangara,⁹ menerapkan teori tersebut untuk menganalisa proses komunikasi antarmanusia sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.2

Unsur-Unsur Komunikasi oleh Miller dan Cherry



⁹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, h. 26.

Dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi komunikan/khalayak. Itulah sebabnya maka langkah pertama yang diperlukan ialah mengenal khalayak atau sasaran.¹⁰ Teori Melvin L. DeFleur tampaknya relevan membahas aspek komunikan dalam proses komunikasi, antara lain; *individual difference theory*, *social categories theory*, *social relationship theory*, dan *cultural norms theory*.¹¹

B. Efektifitas Komunikasi

Imtiaz Hasnain menegaskan, bahwa salah satu aspek dari perspektif Islam terhadap komunikasi ialah penekanannya pada nilai-nilai sosial, religius, dan budaya.¹² Dalam hubungan ini, perlu adanya prinsip-prinsip tegas agar proses penyampaian pesan/informasi yang dapat membentuk suatu pendapat dan sikap, terhindar dari kesalahpahaman, dan sesuai dengan maksud (tujuan).

Dalam Al-Qur'an, komunikasi diartikan sebagai *qaulan* yaitu perkataan (asal kata *qāla-yaqūlu-qaulan*). Seperti kata *qaulan ma'rufa* dan *qaulan sadida* dalam QS. An-Nisa/4: 5 dan 9.

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahannya:

... dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹³

¹⁰Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, h. 58-59.

¹¹Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h. 164-165, dan Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 30-31.

¹²Ahmad Sabban, “Efektivitas Komunikasi Perspektif Islam”, <http://www.waspadamedan.com> (16 November 2013).

¹³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. 6; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002), h. 355.

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

... dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁴

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dijelaskan suatu upaya yang dilakukan Nabi saw dalam proses komunikasi untuk menyamakan arti atau makna pesan yang beliau sampaikan kepada sahabat, sehingga tidak terjadi salah pemahaman dalam komunikasi ataupun salah pengertian. “Aisyah ra berkata: Perkataan Rasulullah adalah ucapan yang sangat jelas, jika orang lain mendengarnya, pasti dapat memahaminya (HR:Abu Daud)”.¹⁵

Tujuan utama digunakannya komunikasi adalah terciptanya komunikasi efektif, yakni mampu melahirkan efek dari komunikasi seperti perubahan pendapat, sikap dan perilaku. Efektivitas komunikasi tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi pada terjadinya perubahan dalam diri mereka untuk mendorong mereka melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan demikian, komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi.

Terkait beberapa indikator yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi, Deddy Mulyana memaparkan hasil kajiannya, antara lain, sistem kepercayaan, sistem nilai, bahasa, gaya berkomunikasi, bahasa tubuh, lingkungan, dan waktu.¹⁶

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 355.

¹⁵Amar Suteja, “Proses Komunikasi Perspektif Hadist”, Blog Amar Suteja. <http://amarsuteja.blogspot.com/2013/01/proses-komunikasi-perspektif-hadist.html> (24 Oktober 2013).

¹⁶Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h. xv-xvii.

Wilbur Schramm dalam karyanya, "*How Communications Works*" menjelaskan beberapa kondisi sukses dalam proses komunikasi,¹⁷ antara lain:

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud
2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat mengerti
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu
4. Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki

Menurut Wilbur Schramm, dikomunikasikannya suatu pesan tidak cukup dengan memperhatikan *timing* dan *placing*. Tetapi, bagaimana pun juga, menurut Rony dalam karyanya yang berjudul "*Communication Planing and Strategy*" dalam mengidentifikasi isi pesan harus menentukan jenis pesan apa yang disampaikan. Ini bisa berupa *informational message*, atau *instructional message*, atau *motivational message*.¹⁸

Dengan demikian, strategi komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasional komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu, untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif, strategi komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan digunakan dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan kemudian.¹⁹

¹⁷Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 32-33.

¹⁸Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 33.

¹⁹Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, h. 33-34.

C. Peran dan Fungsi Hubungan Masyarakat

1. Pengertian

Terdapat beragam pengertian mengenai hubungan masyarakat. Namun istilah Hubungan Masyarakat yang disingkat Humas, pengertiannya sering disamakan dengan *public relation*, yakni orang-orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi yang melancarkan kegiatan *public relation*. Selanjutnya, ruang lingkup *public relation* itu diklasifikasikan menjadi *internal public* dan *external public*.²⁰

Para praktisi hubungan masyarakat sedunia yang terhimpun dalam *The International Public Relations Association* (IPRA) bersepakat untuk merumuskan sebuah definisi yang diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang dijalankan secara berkesinambungan dan berencana, di mana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berusaha memperoleh dan membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya atau yang mungkin ada sangkut pautnya, dengan menilai pendapat umum di antara mereka dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan mereka, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan informasi yang berencana dan tersebar luas.²¹

The British Institute of Public Relations mendefinisikan fungsi hubungan masyarakat sebagai berikut; “upaya yang mantap, berencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian bersama antara organisasi dengan khalayaknya”.²²

Dalam definisi-definisi tersebut secara implisit terdapat tiga fungsi dari hubungan masyarakat, yaitu:

²⁰Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 131.

²¹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 134.

²²Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 134.

- a. Mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya
- b. Menasehati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul
- c. Menggunakan komunikasi untuk memengaruhi pendapat umum.²³

Dari uraian di atas jelas bahwa ciri utama *public relation* atau hubungan masyarakat adalah berlangsungnya komunikasi secara timbal balik. Secara spesifik, praktisi hubungan masyarakat diharapkan peka terhadap pendapat umum.

2. Ciri Hubungan Masyarakat

Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengertian hubungan masyarakat maka ciri-ciri *public relation* perlu dikemukakan sebagaimana berikut:

- 1) Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik
- 2) Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, penggiatan persuasi dan pengkajian pendapat umum
- 3) Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat Humas menginduk
- 4) Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak di luar organisasi
- 5) Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan khalayak.²⁴

Berdasarkan ciri-ciri *public relation* tersebut jelas bahwa peran dan fungsi hubungan masyarakat adalah mendukung tercapainya tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh seluruh insan dalam organisasi yang bersangkutan, mulai dari pimpinan sampai bawahan.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai mengapa diadakan suatu hubungan masyarakat, dan bagaimana melakukan kegiatan ke-Humas-an, para ahli membagi Humas menjadi dua jenis pengertian sebagai berikut.²⁵

²³Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 134-135.

²⁴Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 132.

1) Humas sebagai *technique of communication*

Kegiatan hubungan masyarakat pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Berbeda dengan kegiatan komunikasi lainnya, komunikasi yang dilancarkan oleh Humas mempunyai ciri-ciri tertentu yang disebabkan oleh fungsi Humas, sifat organisasi, dimana hubungan masyarakat itu dilakukan, sifat-sifat manusia yang terlibat, faktor-faktor ekstern yang memengaruhi dan sebagainya.

Ciri utama komunikasi dalam *public relation* sebagaimana disinggung dimuka adalah komunikasi timbal-balik (*two way traffic communication*). Hubungan masyarakat dalam pengertian *technique of communication* mengandung arti bahwa kegiatan hubungan masyarakat dilakukan sendiri oleh seorang pemimpin, apakah ia pemimpin jawatan, perusahaan, instansi militer, lembaga, atau organisasi lainnya.

2) Humas sebagai *state of being*

Pengertian *state of being* disini adalah keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan hubungan masyarakat dalam bentuk biro, bagian, seksi, urusan dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut bergantung pada struktur organisasi di mana hubungan masyarakat itu dilakukan.

3. Fungsi Manajemen Hubungan Masyarakat

Sasaran hubungan masyarakat adalah sasaran komunikasi manajemen. Dalam usaha mencapai tujuan manajemen secara efektif, manusia-manusia yang menjadi sasaran hubungan masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni khalayak dalam (*internal public*) dan khalayak luar (*external public*).

a. Hubungan ke dalam

Hubungan ke dalam (*internal public relation*) pada umumnya adalah hubungan dengan para karyawan/pegawai (*employee relation*). Jadi para

²⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 132-133.

pemimpin organisasi atau kepala Humas harus berkomunikasi langsung dengan para karyawan atau pegawainya, senantiasa mengadakan interaksi atau kontak pribadi.

Humas sebagai representasi organisasi, harus menciptakan dan selanjutnya membina komunikasi dua arah secara timbal balik, baik komunikasi secara vertikal maupun komunikasi secara horisontal. Secara vertikal di satu pihak menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada para karyawan/pegawai, di lain pihak menampung segala keluhan, tanggapan, espektasi para karyawan/pegawai, kemudian menyampikannya kepada pemimpin organisasi untuk memecahkan permasalahannya. Dengan demikian Humas dalam konteks hubungan ke dalam organisasi berfungsi sebagai mediator.²⁶

b. Hubungan ke luar

Hubungan ke luar (*external public relation*) dilakukan dengan khalayak di luar organisasi. Khalayak yang harus menjadi sasaran pembinaan bergantung pada sifat dan ruang lingkup organisasi itu sendiri. Relasi perusahaan tidak sama dengan relasi jawatan pemerintahan. Meski demikian, ada beberapa khalayak yang sama-sama menjadi sasaran kegiatan semua organisasi sehingga harus senantiasa menjalin hubungan, yakni:

- 1) Hubungan dengan masyarakat sekitar (*communitiy relation*)
- 2) Hubungan dengan pemerintah (*goverment relation*)
- 3) Hubungan dengan pers (*press relation*).²⁷

Ketiga aspek relasi tersebut mencakup kegiatan komunikasi yang harus dilakukan Humas dalam rangka membina hubungan yang harmonis dengan khalayak di luar organisasi.

²⁶Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 135-136.

²⁷Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 136-137.

D. *Gambaran Umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*

1. Latar belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²⁸

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.331.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- a. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
- b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- c. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- d. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.²⁹

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dengan amanat Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan HAM membahas RUU tersebut bersama DPR RI. Pada akhirnya RUU KMIP disahkan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 30 April 2008 menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010.³⁰

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.332.

³⁰BPPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*. h. 1-2.

2. Asas dan Tujuan UU KIP

Asas atau prinsip dasar yang dijadikan landasan UU KIP adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.³¹

Secara lebih lengkap, tujuan disahkannya UU KIP adalah untuk:

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

³¹BPPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*. h. 2.

- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.³²

3. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

- a) UU No. 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- d) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e) Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- f) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- g) Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

³²BPPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*. h. 3.

4. Klasifikasi Informasi

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik.³³ Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9);
 - 1) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - 2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - 3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi ini wajib diumumkan paling lambat 6 bulan sekali.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10); Informasi yang masuk dalam kategori ini adalah informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit ber-bahaya seperti flu burung, demam berdarah, dan sebagainya.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11);
 - 1) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya;
 - 2) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - 4) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - 5) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

³³BPPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, *UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*. h. 7-13.

- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - 7) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - 8) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).
- 1) Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - 2) Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) Informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 5) Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - 6) Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - 7) Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 8) Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - 9) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - 10) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*).¹ Menurut Burhan Bungin, jenis penelitian kualitatif bertitik tolak pada paradigma subjektif fenomenologis, yang menekankan alur deskripsi dari induktif ke deduktif atau dari data menuju teori.² Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No. 2, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu tentatif penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar 3 bulan, sejak tahap observasi awal penelitian diselenggarakan pada April 2014, pasca penelitian lapangan bulan Oktober s.d November 2014, hingga tahap pengajuan hasil penelitian dalam sidang *muaqasah* pada April 2015.

¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Cet 1; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 121.

²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 3-28. Lihat juga Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi; Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Paraktis* (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 15; Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksud terdiri atas dua perspektif, yakni pendekatan keilmuan dan pendekatan metodologis.⁴

Sesuai dengan orientasi akademik dan kompetensi peneliti, pendekatan keilmuan yang digunakan adalah ilmu komunikasi khususnya teori tentang strategi komunikasi, uraian teoretis tentang Kehumasan (*public relation*) dalam kerangka pelayanan informasi publik serta deskripsi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan aspek metodologi yang dimaksud adalah penelitian kualitatif yang berorientasi lapangan (*field research*).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua rangkaian data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yang dimaksud bersumber dari data lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data tertulis berupa data-data literatur, misalnya karya tulis; skripsi, tesis dan disertasi, referensi buku ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dokumentasi serta data tertulis lainnya yang relevan dengan orientasi penelitian. Kedua sumber data penelitian tersebut ditelusuri secara berkesinambungan hingga mencapai kesimpulan akhir yang valid dan reliabel.

⁴Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau disebut informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Berikut adalah daftar informan yang dimaksud:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama Informan	Profesi/Jabatan	Ket
1.	Tenri Ampa	Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar	
2.	Khaeruddin	Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat	
3.	Ridha Rasyid	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	
4.	Muh.Hamzah	Kepala Sub Bagian Pemberitaan	
5	Azis Kuba	Wartawan Harian Rakyat Sul-Sel	
6	Didin	Wartawan Harian Tempo	
7	Sudirman	Anggota LSM Demokrasi Sul-Sel	

Adapun teknik yang digunakan dalam memilih informan adalah *purposive sampling*, yakni sampel yang ditentukan atas dasar pertimbangan tertentu.⁵ Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah a) menentukan atau mengidentifikasi informan yang memahami permasalahan, b) menentukan informan yang terlibat sebagai subjek

⁵Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Cet. 2; Jogjakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008), h. 88.

permasalahan, c) memadukan atau membandingkan informan yang tidak menganalisis kejadian menurut perspektif mereka.

2. Observasi

Teknik ini dilakukan secara sistematis. Dalam proses observasi, peneliti lebih memilih model observasi non-partisipan. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi kewajaran kelakuan objek yang diamati. Fokus observasi pada kinerja Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, dan juga hal-hal yang dianggap mendukung proses pengumpulan data, seperti lokasi, kondisi, dan lain sebagainya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau arsip-arsip kelembagaan/instansi Pemerintah Kota Makassar sebagai sumber data. Terutama menyangkut kondisi obyektif obyek penelitian, baik berupa profil Humas Pemerintah Kota Makassar, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), grafis/foto kegiatan Humas Pemerintah Kota Makassar dan sebagainya (lihat Lampiran Dokumentasi Foto, h. 75-78).

E. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan aspek-aspek yang diteliti, diperlukan alat/instrumen pengumpulan data. Instrumen yang direncanakan meliputi daftar cek observasi dan panduan wawancara (lihat Lampiran Pedoman Wawancara, h. 71-74) yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menggunakan pendekatan logika induktif, di mana data yang diolah berangkat dari hal-hal yang khusus dan bermuara pada hal-hal umum.⁶ Adapun tahapan analisis data disesuaikan dengan fokus masalah yang diteliti, sebagaimana berikut:

1. Klarifikasi data

Konseptualisasi hasil wawancara dalam bentuk transkrip yang diinterpretasi, kemudian diklarifikasi oleh informan. Selain itu, data observasi, telaah pustaka, dan sumber data lainnya tetap didiskusikan dengan informan guna memenuhi tingkat konsistensi dan kongruensi data (validitas internal).⁷

2. Reduksi data

Tahapan memilah data yang terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian. Memilah data dalam artian mengukur derajat relevansinya dengan maksud dan tujuan penelitian, dengan jalan penyederhanaan atau memadukan data yang tersebar, kemudian kembali mengeksplorasi data tambahan.

3. Penyajian data

Proses deskripsi informasi atau uraian naratif peneliti tentang temuan data penelitian. Data yang tersaji kemudian diringkas ke dalam bentuk bagan.

4. Konklusi dan verifikasi

Tahapan akhir analisis data dengan melibatkan kembali para informan untuk memenuhi kriteria validitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 66.

⁷Lincoln dan Guba serta Merriam mengistilahkan kongruensi untuk validitas internal dan konsistensi atau *dependability* untuk reliabilitas data penelitian kualitatif. Uraian selengkapnya lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 294-295.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil HUMAS Pemerintah Kota Makassar

1. Struktur Organisasi

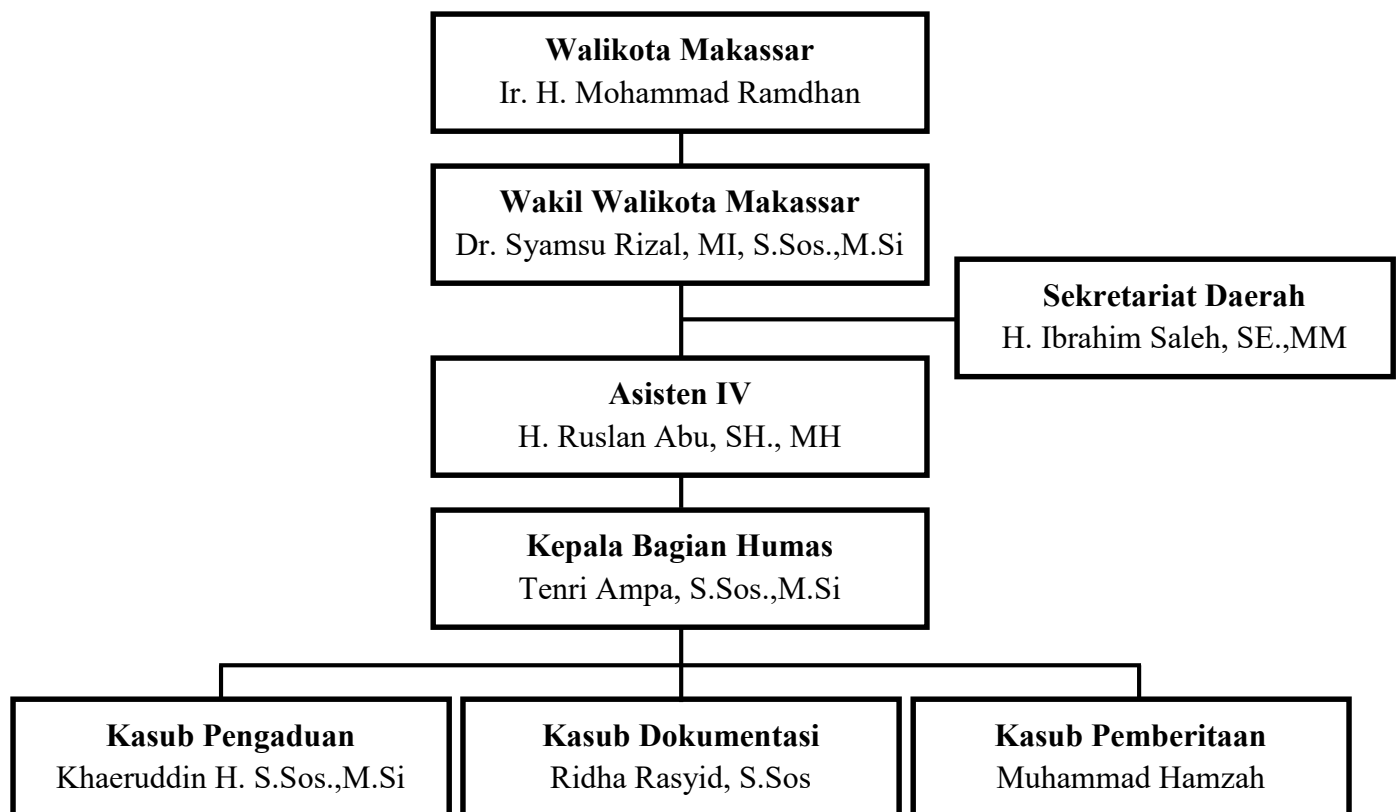
Hubungan Masyarakat atau yang biasa disebut Humas merupakan salah satu unsur pendukung dalam Pemerintahan yang berada di bawah naungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Walikota dan Wakil Walikota
- b. Sekretaris Daerah
- c. Asisten Bidang Pemerintahan:
 - 1) Bagian Hukum
 - 2) Bagian Organisasi dan Tata laksana
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat:
 - a) Sub Bagian Pengaduan Masyarakat
 - b) Sub bagian Dokumentasi
 - c) Sub Bagian Pemberitaan
- d. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Bagian Pemberdayaan Perempuan
- e. Asisten Bidang Administrasi:
 - 1) Bagian Umum

- 2) Bagian Kepegawaian
- 3) Bagian Keuangan
- 4) Bagian Perlengkapan

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Bagian Humas
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar



Sumber: Arsip Bagian Humas Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Makassar 2014

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melakukan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- c. Pembinaan organisasi, pelaksanaan, keuangan, prasarana dan sarana.
- d. Pembina pegawai negeri sipil daerah.
- e. Penyelenggaraan administrasi pemerintah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Humas mengadakan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Makassar,¹ yaitu :

- a. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, untuk memperjelas kebijakan Pemerintah Kota.

¹Lihat Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kota Makassar, Pasal 47 Bagian Ketiga, Bagian Hubungan Masyarakat. Data observasi terhadap Peraturan Wali Kota Makassar yang diperoleh dari Asrul (Staf Subbag. Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar), 2 Oktober 2014.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Kota;
- 3) Penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
- 4) Penyiapan bahan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
- 5) Penyiapan bahan bimbingan pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
- 6) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub-Sub Bagian Humas

a. Sub Bagian Pemberitaan

- 1) Sub bagian pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dalam rangka penyajian pemberitaan kegiatan pemerintah kota
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sub bagian pemberitaan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakn penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya

- b) Melakukan penyajian pemberitaan kegiatan pemerintah kota baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah kota
 - c) Melakukan usaha untuk mengesahkan pendapat umum dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah kota makassar
 - d) Mempersiapkan data/bahan dalam rangka menyelenggarakan jumpa pers secara berkala
 - e) Mengumpulkan dan mempersiapkan bahan – bahan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah kota makassar
 - f) Mempersiapkan bahan/data untuk pemberian tanggapan terhadap pembaca mass media
 - g) Melakukan monitoring perkembangan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik
 - h) Melaksanakn tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
 - i) Menyusun laporan haisl pelaksanaan tugas
- b. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat
- 1) Subbagian pengaduan masyarakat mempunyai tugas menerima, menindaklanjuti serta mengkoordinasikan pengaduan masyarakat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat;
 - b) Mengolah dan menganalisis informasi/pengaduan;
 - c) Mendata dan mencatat setiap pengaduan yang masuk;
 - d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;

e) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Dokumentasi

- 1) Sub bagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan – bahan pendokumentasian dalam rangka distribusi dalam penyebarluasan hasil – hasil kegiatan Pemerintah Kota.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b) Mengumpulkan pemberitaan melalui media cetak (klipping) atas permasalahan Pemerintah Kota untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan;
 - c) Memelihara pengembangan masyarakat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai bahan informasi;
 - d) Melakukan perekaman dan pembinaan dokumentasi;
 - e) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mensinkronasikan data/bahan informasi;
 - f) Menjaga kerahasiaan data yang dianggap rahasia oleh atasan;
 - g) Mengumpulkan pemberitaan melalui media cetak (klipping) atas permasalahan Pemerintah Kota dan untuk memberikan informasi bila ada pihak yang memerlukan.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberitakan atasan.
 - i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Visi dan Misi

Hubungan Masyarakat memiliki Visi dan Misi sebagai pendukung dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

- a. Visi, "Menjadikan Humas sebagai mediator informasi, publikasi, dan sosialisasi kebijakan pemerintah".
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan peran dan Fungsi Humas dalam pendataan informasi.
 - 2) Meningkatkan Peran serta dan partisipasi dalam kerangka kesinambungan Kinerja Humas.
 - 3) Mewujudkan citra ke-Humas-an yang lebih baik kedepan.
 - 4) Meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta disiplin staf.
 - 5) Membangun komunikasi dan kerjasama secara bersinergis dengan media cetak dan media visual.
 - 6) Memposisikan Humas sebagai Sentra informasi publikasi, dan Sosialisasi Kebijakan pemerintah
 - 7) Menyebarluaskan Informasi atas kebijakan pemerintah secara internal dan Eksternal.

6. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Hubungan Masyarakat memiliki tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai pendukung dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

- a. Tujuan
 - 1) Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi ke-Humas-an dalam menciptakan Sistem Informasi yang mampu menjembatani stakeholder.

- 2) Mengaplikasikan serta mengolaborasi potensi aparat bagian Humas dalam Implementasi system informasi dan menejemen ke-Humas-an yang terintegrasi.

b. Sasaran

- 1) Menciptakan hubungan sinegritas antara aparat Bagian Humas dangan Wartawan dan Masyarakat pers pada umumnya.
- 2) Meningkatkan peran yang lebih strategis pada Bagian Humas sebagai Penyampaian informasi atas kebijakan pemerintah kota.
- 3) Meningkatkan kualitas penyajian suatu informasi serta melakukan pemantauan sikap masyarakat atas informasi yang diterima.

c. Kebijakan

- 1) Menetapkan system informasi internal Bagian Humas.
- 2) Menetapkan Distribusi Informasi, Publikasi serta sosialisasi melalui Pembangunan kemitraan Media Cetak, Wartawan, dan Masyarakat Pers Pada umumnya.

B. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai dengan fokus masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini dilakukan di dalam lingkup Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, terhadap informan kunci yang secara langsung berkompeten dan berkecimpung sebagai pelaksana ke-Humas-an.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Tenri Ampa, mengatakan bahwa langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan undang-undang serta tiga peraturan pelaksanaannya.² Tiga peraturan pelaksanaan UU KIP seperti yang dimaksud oleh Tenri Ampa, antara lain adalah:

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.³
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.⁵

²Tenri Ampa, Kabag. Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 2 Oktober 2014.

³Komisi Informasi, “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010”. *Website Resmi Komisi Informasi*, <http://www.komisiinformasi.go.id> (akses 2 Oktober 2014).

⁴Departemen Hukum dan HAM, “Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010”, *Website Resmi Departemen Hukum dan HAM*, <http://www.djpp.depkumham.go.id> (akses 2 Oktober 2014).

⁵Departemen Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010”, *Website Resmi Departemen Dalam Negeri*, <http://www.depdagri.go.id> (akses 2 Oktober 2014).

Berdasarkan ketiga peraturan pelaksanaan UU KIP tersebut, Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar kemudian mengimplementasikan beberapa langkah strategi yang diterapkan, sebagaimana berikut:

1. Penetapan PPID dan Tata Kerja PPID melalui Peraturan Wali Kota

Kewajiban pimpinan pemerintah daerah dalam menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disingkat PPID) diatur dalam PP No. 61/2010. PPID di lingkungan pemerintah daerah dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan dokumentasi. PPID ditunjuk dan diangkat satu tahun setelah peraturan pemerintah diundangkan pada 23 Agustus 2010. Artinya seluruh badan publik, termasuk pemerintah Kota Makassar, harus memiliki PPID pasca ditetapkannya aturan itu pada tanggal 23 Agustus 2011.

Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 Permendagri No. 35/2010 disebutkan bahwa “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.” Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota (Pasal 7 ayat 4 dan 5).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat SKPD) atau pejabat fungsional (Pasal 8 ayat 5 dan 6). PPID di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah (Pasal 8 ayat 2 dan 3). Dalam Pasal 12 ayat 2 dan 3 jelas disebutkan bahwa tata kerja PPID di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/wali kota.

Secara spesifik PPID yang dimaksud dalam penelitian ini adalah elemen struktural atau pejabat Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar,

yang terdiri atas Kepala Bagian Humas, Kepala Sub bagian Pengaduan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Dokumentasi, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan serta seluruh staf dan jajarannya.

2. Penetapan Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh Badan Publik (khususnya Pemerintah Daerah) terkena kewajiban menyediakan informasi publik serta membuat standar layanan informasi publik.⁶

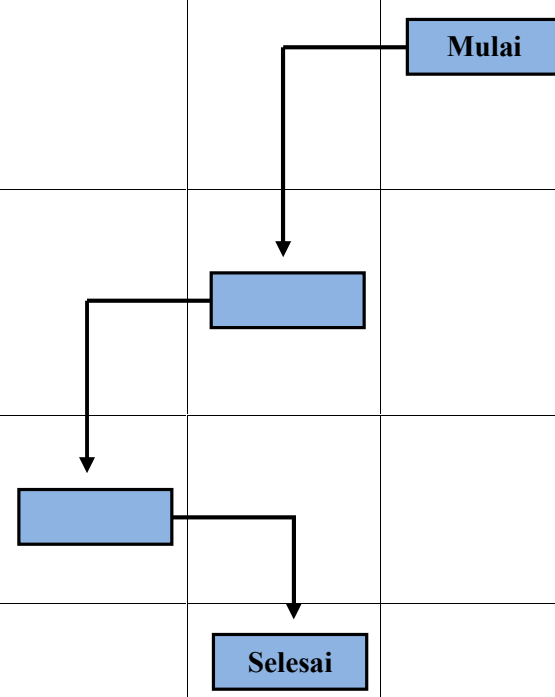
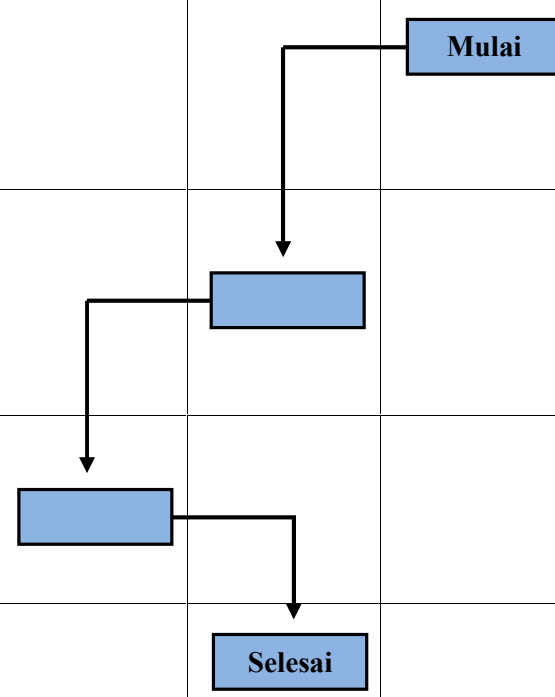
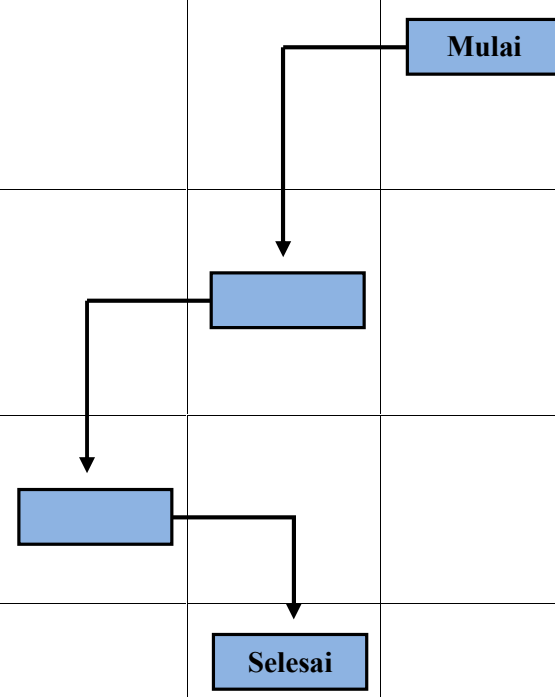
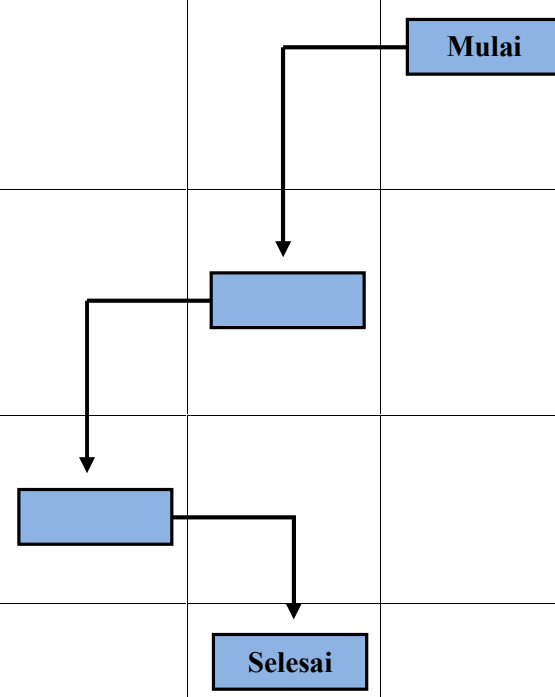
Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar kemudian menerjemahkan standar layanan yang wajib dipenuhi adalah mencakup Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) layanan informasi publik sebagaimana berikut:

- a. Keberadaan PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
- b. Sistem informasi dan dokumentasi bertujuan untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti papan pengumuman, situs resmi atau meja informasi sebagai tempat khusus pelayanan informasi publik;
- d. Daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan tata cara penetapan informasi publik yang masuk dalam kategori pengecualian;
- e. Standar biaya salinan informasi publik serta tata cara pengajuan dan pengelolaan keberatan terkait dengan pelayanan informasi publik.

⁶Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah, Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Lihat <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/daftar-badan-publik> (akses 4 November 2014)

Tabel 4.1
Standar Alur Kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar 2014

a. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat

	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pimpinan Unit Kerja/SKPD	Kasubag. Pengaduan Masyarakat	Staf Subag. Pengaduan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Bagian Pengaduan Masyarakat	Menerima dan mencatat aduan yang masuk melalui telepon, SMS, media cetak dan aduan langsung			 Mulai	1. Blangko pengaduan 2. Agenda aduan			
	Memverifikasi aduan dengan berkoordinasi dengan unit kerja/SKPD terkait		 		Blangko aduan			
	Menindaklanjuti aduan berupa jawaban langsung di lapangan	 			Blangko aduan		Tindak lanjut aduan	
	Memantau tindaklanjut aduan		 Selesai		Blangko aduan			

Keterangan:

Proses pelayanan Sub Bagian Pengaduan Masyarakat

1. Menerima aduan
2. Memverifikasi berkas
3. Menindaklanjuti di lapangan
4. Memantau/mengevaluasi

b. Sub Bagian Dokumentasi

	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kabag. Humas	Kasubag. Dokumentasi	Staf Subag Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Bagian Dokumentasi	Menerima disposisi surat penawaran berlangganan		Mulai		Surat penawaran			
	Mencatat di agenda surat masuk		Tidak		Agenda surat masuk			
	Melakukan verifikasi terhadap surat penawaran. Apabila disetujui ditetapkan menjadi mitra kerja dan jika tidak disetujui akan disampaikan ke pemohon				Surat penawaran			
	Membuat MoU dengan Mitra Kerja. Melaksanakan pengawasan/monitoring dan merealisasikan pembayaran	Ya			MoU		Nota	
			Selesai					

Keterangan:

Proses pelayanan Sub Bagian Dokumentasi

1. Menerima disposisi surat
2. Mencatat agenda surat
3. Verifikasi surat penawaran (diterima atau tidak)
4. Membuat MoU dan monitoring

Sumber: Arsip Bagian Humas Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Makassar 2014

Menurut Kasub Pengaduan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Khaeruddin, mengatakan, jika pemohon informasi datang meminta data informasi yang tidak dimiliki Bagian Humas Pemerintahan Kota Makassar biasanya dirujuk ke SKPD atau instansi lain yang bersangkutan.⁷

Demikian pula Kasub Pemberitaan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Hamzah, mengatakan, saat berhubungan dengan media massa, kebijakan pemberian informasi satu pintu pun diterapkan. Pejabat paling berwenang memberi keterangan kepada media massa adalah Kepala Bagian Humas. Terkadang jika Kepala Bagian Humas tidak berada di tempat, informasi dimaksud tidak dapat diberikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.⁸

3. Publikasi Informasi Proaktif Melalui Multimedia

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pelayanan informasi kepada publik melalui dua cara, yaitu a) publikasi informasi proaktif tanpa harus menunggu permintaan dari publik dan, b) publikasi informasi jika ada permintaan dari publik. Publikasi informasi proaktif tanpa harus menunggu permintaan dari publik, misalnya mensosialisasikan langsung informasi melalui media seperti website, melalui papan informasi, majalah, bulletin, mengundang masyarakat dalam sebuah forum dialog, seminar dan sebagainya.

⁷Khaeruddin, Kasub Pengaduan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 6 Oktober 2014.

⁸Muhammad Hamzah, Kasub Pemberitaan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 13 Oktober 2014.

Menurut keterangan Kasub Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Ridha Rasyid, informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan sertamerta masuk dalam publikasi informasi proaktif. Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar berupaya mempublikasikan informasi secara proaktif dengan cara menetapkan ketentuan pemberian informasi menggunakan berbagai media yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.⁹

Dalam implementasi pelayanan informasi publik di Kota Makassar, faktor media dan tata cara pelayanan informasi patut diperhatikan agar akses informasi publik mencapai tujuannya. Menurut UU KIP, informasi proaktif yang dipublikasikan lewat sejumlah medium/laporan yang diterbitkan, leaflet, brosur, dan website, setidaknya harus berisi beberapa jenis informasi dasar sebagaimana berikut:

- a. Profil organisasi mencakup alamat lengkap SKPD, nomor telepon dan faksimile, serta struktur organisasi.
- b. Program sedang berlangsung mencakup nama, kegiatan, sasaran, penerima manfaat, anggaran, narahubung utama, serta alamat dan nomor telepon yang digunakan untuk program kegiatan.
- c. Anggaran mencakup total alokasi anggaran untuk tahun sedang berjalan, rencana anggaran untuk tahun berjalan, laporan keuangan tahun sebelumnya, serta daftar aset dan persediaan.
- d. Akses informasi publik mencakup jumlah permohonan informasi yang diterima, jumlah permohonan informasi yang ditanggapi, jumlah permohonan informasi yang ditolak, alasan penolakan, prosedur bagi permohonan informasi, narahubung dan rinciannya.

⁹Ridha Rasyid, Kasub Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 20 Oktober 2014.

- e. Peraturan dan kebijakan berdampak pada publik berupa daftar undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang telah diberlakukan atau dalam proses pengesahan.

Pemerintahan Kota Makassar saat ini telah memiliki website resmi, yang isinya telah memenuhi kategori yang ditetapkan dalam UU KIP. Website atau portal (lihat Gambar 4.2) yang dimiliki Pemerintahan Kota Makassar menggambarkan informasi yang diprasyaratkan UU KIP, yang berisi beberapa jenis informasi dasar seperti profil organisasi, program yang sedang dijalankan, informasi tentang keuangan, informasi tentang akses informasi, serta peraturan/kebijakan yang berpengaruh terhadap publik.

Alamat website sarana penyampaian informasi pemerintah tersebut adalah <http://www.makassarkota.go.id>. Website ini menaungi seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Berikut adalah tampilan menu dalam website resmi Pemerintah Kota Makassar yang relatif mudah untuk diakses oleh publik.

Gambar 4.2

Portal Resmi Pemerintah Makassar





Sumber: <http://www.makassarkota.go.id> – Dinas Komunikasi dan Informasi
Pemerintah Kota Makassar 2014

Website resmi Pemerintah Kota Makassar dari segi sajian informasinya relatif mutakhir. Ketika diakses pada 4 November 2014, di dalam www.makassarkota.go.id tersaji beberapa informasi seperti profil Pemerintah Kota Makassar, program-program kegiatan, data anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan peraturan lokal di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tersaji dalam website. Selain itu, website ini juga memuat informasi pelayanan publik seperti informasi layanan perizinan, layanan kesehatan, layanan komunikasi interaktif sebagai wadah aspirasi dan inspirasi bagi masyarakat.¹⁰

Selain mengoptimalkan publikasi informasi secara proaktif melalui multimedia, Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar menerapkan sebuah sistem skoring untuk mengetahui (menilai dan mengevaluasi) sejauh mana kinerja PPID khususnya Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, Sub Bagian Dokumentasi, dan Sub Bagian Pemberitaan dalam memublikasikan informasi secara proaktif sesuai dengan

¹⁰Data observasi terhadap website/portal resmi Pemerintah Kota Makassar yang dilansir oleh Pengelola Data Elektronik (PDE) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar (akses 4 November 2014).

standar UU KIP. Sejumlah dokumen atau informasi yang telah dipublikasikan selama kurun waktu satu tahun selanjutnya akan dievaluasi.

4. Publikasi Informasi Proaktif Melalui Tatap Muka

Temuan lain yang muncul dalam penelitian adalah adanya kecenderungan sebagian masyarakat Makassar untuk menerima informasi proaktif melalui tatap muka. Sosialisasi tatap muka ini selalu disebut sebagai cara pemberian informasi dari seluruh SKPD ke masyarakat. Namun menurut keterangan Tenri Ampa, kelompok-kelompok masyarakat kadang mengatakan bahwa sosialisasi tatap muka itu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau perangkat pemerintah Kota Makassar yang tersebar di desa/kecamatan.¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, setidaknya terdapat dua sikap dari masyarakat dalam merespon kebijakan pelayanan informasi publik. Pertama, kelompok masyarakat yang cenderung suka memperoleh informasi lewat sosialisasi atau melalui forum tatap muka (lihat Lampiran Dokumentasi Foto, h. 75-78). Kedua, kelompok masyarakat yang lebih suka menerima informasi melalui media tertentu seperti melihat secara langsung informasi yang terpampang di papan informasi, bulletin, leaflet, brosur, dan website.

Elaborasi terkait medium pelayanan informasi publik ini diperlukan agar Humas Pemerintah Kota Makassar tidak terpaku pada asumsi bahwa keterbukaan informasi publik identik dengan publikasi melalui website. Kenyataannya sebagian masyarakat Makassar masih “gagap teknologi” atau tidak dapat mengakses internet karena keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah desa/kecamatan Makassar sehingga memengaruhi model komunikasi dan informasi yang diterapkan.

¹¹Tenri Ampa, Kabag. Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 4 November 2014.

Website sendiri merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan informasi oleh Humas Pemerintah Kota Makassar. Namun demikian, website tersebut perlu dimaksimalkan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar UU KIP. Perlu juga dipikirkan berbagai media pelayanan informasi publik lainnya, termasuk kemungkinan memasukkan model pelayanan informasi langsung ke masyarakat dalam standar pelayanan informasi publik.

Dalam hal ini, Ridha Rasyid menjelaskan bahwa Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar juga berupaya meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi publik melalui berbagai pemanfaatan ragam media sosialisasi serta metode yang dianggap efisien dan efektif. Sebagai contoh, penyebarluasan informasi melalui penerbitan bulletin, melalui siaran interaktif radio dan televisi, kemitraan dengan media lokal atau press release, mengadakan promosi dan pameran yang melibatkan mitra kerja tertentu, termasuk mengadakan forum tatap muka atau dialog publik.¹²

5. Jaminan Akses Informasi Publik Melalui Peraturan Lokal Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan penelusuran data dalam penelitian ini, terdapat satu peraturan yang mengatur tentang akses informasi publik, yaitu Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Dengar Pendapat Publik dalam Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kota Makassar.¹³

Peraturan ini antara lain memuat pengertian tentang sistem informasi, yakni mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan

¹²Ridha Rasyid, Kasub Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 10 November 2014.

¹³Data observasi terhadap Peraturan Wali Kota Makassar yang diperoleh dari Asrul (Staf Subbag. Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar), 2 Oktober 2014.

sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun dokumen elektronis mengenai segala hal terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dikelola (Pasal 1 ayat 26).

Ketentuan lain dalam peraturan itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan data dan informasi (Pasal 12 ayat 2 huruf b) serta pertanggungjawaban kepada publik melalui media elektronik, media cetak, papan informasi dan/atau secara langsung (Pasal 19 ayat 2).

Menurut Staf Sub Bagian Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, Asrul, mengatakan bahwa peraturan yang baik dan bagus memang belum tentu identik dengan implementasinya. Misalnya, pihak luar yang meminta informasi tentang peraturan daerah akan dicatat lebih dahulu. Setelah itu, pemohon dipersilakan memfotokopi peraturan daerah atau peraturan yang dimaksud. Setiap hari rata-rata 5-6 orang datang meminta atau meminjam informasi tentang peraturan daerah, kebanyakan dari SKPD yang berbeda. Permintaan mereka selalu dipenuhi.¹⁴

Dalam situasi tertentu, hal itu belum tentu terjadi jika yang meminta adalah mereka dari kalangan luar pemerintahan. Misalnya ketika seorang warga mencoba meminta berkas peraturan terkait sistem dokumentasi pemerintah Kota Makassar. Namun justru harus mencari sendiri peraturan yang dimaksud. Minimnya masyarakat yang memanfaatkan akses informasi menunjukkan adanya persoalan dalam penyebaran informasi dari Bagian Humas pemerintah Kota Makassar.¹⁵

¹⁴Asrul, Staf Subbag. Dokumentasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 10 November 2014.

¹⁵Contoh kasus dialami Forum Warga Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait pencarian informasi hukum seperti Peraturan Daerah. Pada 2013 yang lalu, ketika muncul persoalan retribusi yang dianggap memberatkan PKL di Kota Makassar, Forum Warga PKL menghadap ke Pemkot Makassar. Namun anggota Humas menampik mereka dengan alasan Perda tersebut masuk dalam kategori rahasia. Mereka akhirnya memperoleh salinan Perda Retribusi tersebut dari salah seorang anggota Humas lainnya secara pribadi.

Pembelajaran yang dapat dipetik dari implementasi peraturan-peraturan tersebut bagi proses implementasi UU KIP adalah keberhasilan implementasi undang-undang ini amat terkait dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan jaminan akses informasi yang diberikan. Implementasi UU KIP tidak cukup hanya dengan membangun kesiapan badan-badan publik yang wajib menyediakan informasi, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat UU KIP bagi diri mereka.

C. Faktor Penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik

Faktor subjektivitas tampaknya memengaruhi tata cara penolakan permintaan informasi serta penetapan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses publik. Jika melihat mekanisme pelayanan informasi yang selalu menunggu disposisi Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, penetapan apakah informasi yang diminta masuk dalam kategori rahasia atau tidak, juga tergantung pada keputusan Kepala Bagian Humas. Kategorisasi informasi bersifat rahasia atau tidak sangat tergantung pada subyektivitas Kepala Bagian Humas.¹⁶

Selain itu, jika melihat mekanisme yang diterapkan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, ada kecenderungan bahwa masyarakat yang memiliki

¹⁶Khaeruddin, Kasub Pengaduan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 17 November 2014.

relasi atau dikenal oleh pegawai Humas bersangkutan, relatif akan lebih mudah mendapatkan informasi. Mereka dapat langsung menemui pejabat bersangkutan untuk meminta informasi yang dikehendaki. Namun, bagi masyarakat yang tidak memiliki relasi, terlihat sulit mendapatkan informasi atau kurang mendapat pelayanan secara maksimal.

Indikasi itu ditunjukkan kalangan LSM yang mencoba mencari informasi dari Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar. Informan dari LSM saat diwawancarai menyatakan bahwa untuk memperoleh informasi dari Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar mereka setidaknya memiliki kenalan staf atau pejabat dari Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar.

Untuk memperoleh informasi harus memiliki pertemanan dengan salah satu pegawai lembaga tersebut. Jika tidak memiliki, akan sangat sulit sekali untuk memperoleh informasi yang lengkap. Jika meminta informasi memakai seragam, kita akan mudah memperoleh informasi. Namun, jika mengenakan pakaian biasa saja jangan harap kita mendapatkan informasi yang diinginkan.¹⁷

Praktik permintaan dan pelayanan informasi di Makassar tampaknya belum sampai pada level kesadaran akan adanya hak publik untuk mendapatkan informasi. Permintaan informasi atau pelayanan yang muncul masih dalam kerangka pekerjaan. Informan dari kalangan jurnalis, misalnya, menganggap bahwa UU KIP tidak terlalu berpengaruh terhadap kerja mereka, karena mereka relatif mudah mendapatkan informasi tanpa adanya aturan perundangan itu.¹⁸

Demikian pula dengan warga masyarakat. Banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dari Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar. Penyelesaiannya cenderung menggunakan “mekanisme” biasa, memanfaatkan orang

¹⁷Wawan, Anggota LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), *Wawancara*, Makassar, 5 November 2014.

¹⁸Azis Kuba, Jurnalis Harian Rakyat Sulsel, *Wawancara*, , Makassar, 16 November 2014.

dalam untuk kepentingan diri sendiri ketimbang mendorong kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan seperti diamanatkan UU KIP.

Subjektivitas Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar juga terkait dengan penetapan informasi yang bisa diakses atau tidak (informasi yang dikecualikan). Menurut Tenri Ampa, meskipun belum pernah menetapkan sebuah informasi masuk dalam kategori rahasia, menyatakan pernah menetapkan sebuah kebijakan informasi yang masuk kategori sensitif.

Belum ada data atau informasi masuk dalam kategori dirahasiakan. Akan tetapi, ada semacam kebiasaan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh masing-masing bidang harus sepengetahuan Kepala Dinas, terutama untuk informasi yang cukup sensitif ... bila hendak dipublikasikan, informasi itu harus mendapat persetujuan Kepala Dinas. Akan tetapi, lembaga tersebut tidak memiliki kriteria informasi apa saja yang masuk dalam kategori sensitif.¹⁹

Ketidakjelasan penetapan informasi yang masuk kategori rahasia pada Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar juga terkait dengan praktik menolak permintaan informasi. Sebagian besar PPID yang menjadi narasumber penelitian ini, mengaku belum pernah menolak permintaan informasi. Kecuali satu kasus penolakan permintaan informasi yang disebutkan oleh Khaeruddin.

Dengan alasan takut disalahgunakan, seorang pegawai pernah menolak permintaan salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diminta oleh seorang mahasiswa yang sedang meneliti soal anggaran daerah. Bahkan, salinan informasi yang dimaksud tidak boleh dipinjamkan apalagi difotokopi. Padahal menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, DIPA tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, sehingga seharusnya dapat dibuka.²⁰

¹⁹Tenri Ampa, Kabag. Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 4 November 2014.

²⁰Khaeruddin, Kasub Pengaduan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 17 November 2014.

Begitu pula dengan rujukan jika informasi yang diminta tidak dimiliki oleh Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar. Seluruh informan yang menjadi narasumber mengaku jika informasi yang diminta tidak dimiliki, mereka akan menghubungkan si pemohon dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki informasi tersebut.

Salah satu proses yang menunjang SKPD untuk merujuk informasi ke SKPD lain adalah adanya koordinasi program lintas sektor di bawah Bappeda dan Sekda sesuai SK Gubernur, yang memungkinkan dinas terkait mengetahui keberadaan informasi itu. Informasi yang tidak berada dalam kewenangan dinas tertentu, biasanya informasi yang sedang hangat dibicarakan dan dibutuhkan masyarakat, diperoleh dari pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bako Humas).²¹

Menurut Muhammad Hamzah, pertemuan Bako Humas itu biasanya mengangkat dan membahas masalah-masalah aktual yang menjadi pembicaraan publik. Dalam pertemuan itu, pimpinan SKPD yang membidangi persoalan dimaksud akan menjadi narasumber; dia memberi informasi panjang lebar tentang topik tersebut. Jika dibutuhkan, dia dapat membagi informasi atau menjadi sumber rujukan.²²

²¹Bako Humas adalah pertemuan koordinasi di antara humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Humas Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulan.

²²Muhammad Hamzah, Kasub Pemberitaan Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar, *Wawancara*, Kantor Walikota Makassar, 24 November 2014.

D. Pembahasan

Berdasarkan temuan data lapangan dan pendekatan teori yang digunakan maka kedua pembahasan tersebut dapat dikaitkan. Pada dasarnya data-data lapangan hasil temuan peneliti mendukung teori strategi komunikasi, di mana Humas Pemerintah Kota Makassar baik dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik, baik dari segi pelayanan kepada publik, sosialisasi kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik.

Strategi komunikasi pada dasarnya adalah sintesis antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis, dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi.²³

Berdasarkan hasil analisis tentang strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar, ditemukan suatu perencanaan komunikasi dan penerapan konsep manajemen komunikasi yang saling berkaitan satu dan lainnya, yaitu:

1) Perencanaan

Pada tahap ini strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Makassar disusun atau direncanakan secara konseptual melalui perumusan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan. Hal ini dilihat dengan adanya tiga peraturan pelaksanaan UU KIP yang dirumuskan secara bersama lembaga pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar hukum dan konsep pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Termasuk dalam hal ini adanya penetapan standar layanan informasi publik (Standar Operasional

²³Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 32.

Prosedur) dan jaminan akses informasi publik melalui Peraturan Lokal Pemerintah Kota Makassar (Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2008).

2) Pengorganisasian

Pada tahap ini Humas Pemerintah Kota Makassar mengorganisir perangkat kerjanya agar konsep dan strategi komunikasi yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara menata atau menetapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan dokumentasi atau disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, antara lain; Kepala Bagian Humas, Kepala Sub bagian Pengaduan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Dokumentasi, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan serta seluruh staf dan jajarannya yang diberkoordinasi dengan pejabat fungsional (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta elemen struktural lainnya.

3) Pelaksanaan/Implementasi

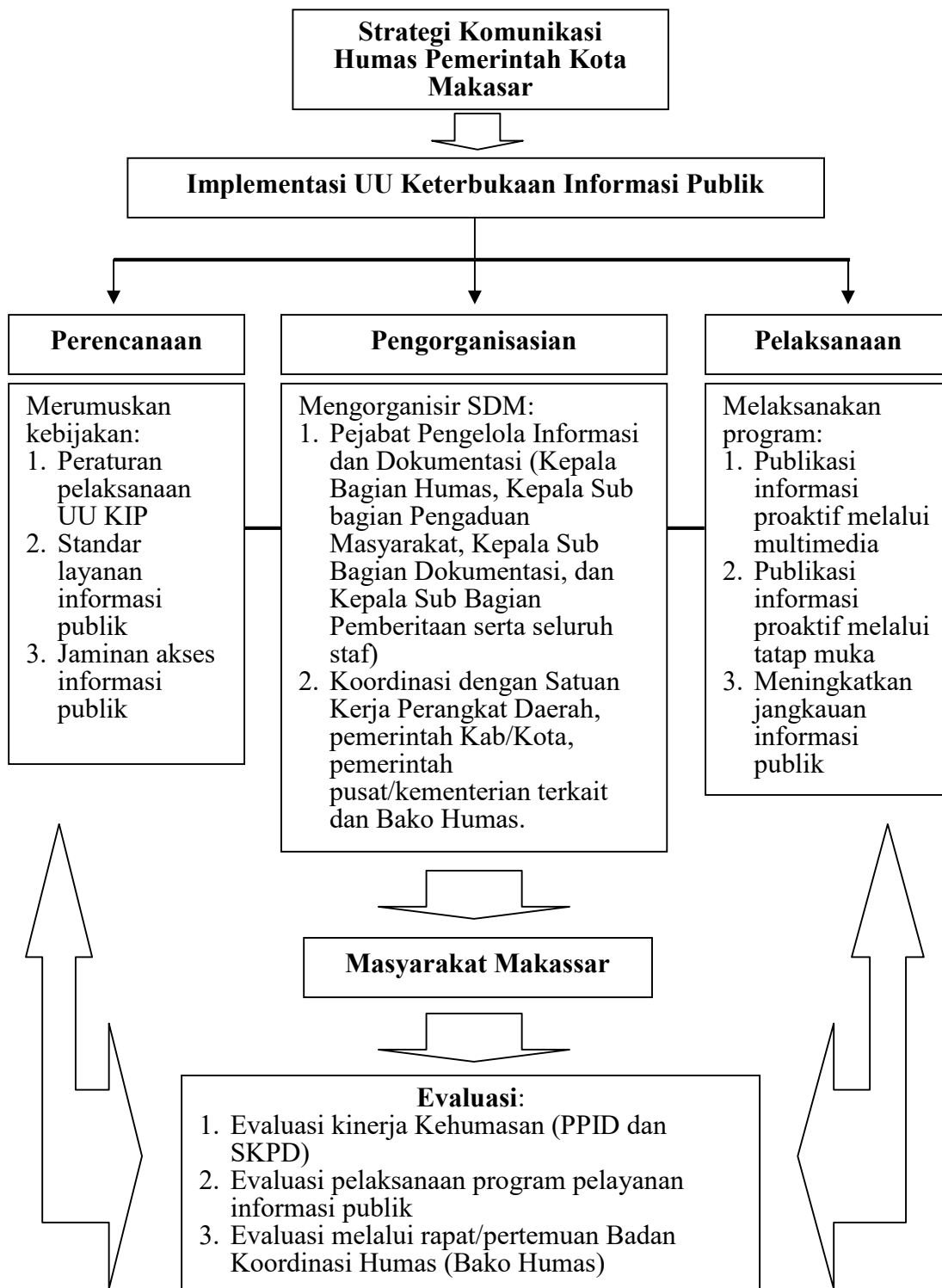
Pelaksanaan atau implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada sejauhmana kinerja PPID-SKPD, terutama dalam aspek pelayanan informasi publik. Terkait dengan hal itu, peneliti menemukan dua model strategi komunikasi (pelayanan informasi publik) Humas Pemerintah Kota Makassar, yaitu dalam bentuk program kerja; a) publikasi informasi proaktif melalui multimedia, dan b) publikasi informasi proaktif melalui tatap muka.

Kedua model pelayanan informasi publik tersebut, baik melalui tatap muka dan melalui multimedia, diimplementasikan berdasar kebutuhan masyarakat itu sendiri. Artinya ada penyesuaian antara model pelayanan informasi dengan kondisi riil masyarakat yang berbeda-beda pola ekspektasinya dalam menerima atau mengakses informasi. Ada kelompok masyarakat yang cenderung suka memperoleh

informasi lewat sosialisasi atau melalui forum tatap muka, dan ada kelompok masyarakat yang lebih suka menerima informasi melalui media tertentu seperti melihat secara langsung informasi yang terpampang di papan informasi, bulletin, leaflet, brosur, dan website.

Dalam penerapannya, Humas Pemerintah Kota Makassar berupaya meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi publik melalui berbagai pemanfaatan ragam media sosialisasi serta metode yang dianggap efisien dan efektif. Sebagai contoh, penyebarluasan informasi melalui penerbitan bulletin, melalui siaran interaktif radio dan televisi, kemitraan dengan media lokal atau press release, mengadakan promosi dan pameran yang melibatkan mitra kerja tertentu, termasuk mengadakan forum tatap muka atau dialog publik.

Gambar 4.3
Model Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Makassar



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan, tujuan, pendekatan teori, metode serta hasil penelitian, dapat dijelaskan kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Humas Pemerintah Kota Maassar menerapkan strategi komunikasi dalam bentuk perencanaan komunikasi dan penerapan konsep manajemen komunikasi, yaitu:
 - a. Perencanaan, adalah perumusan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan terkait tiga peraturan pelaksanaan UU KIP yang dirumuskan secara bersama lembaga pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar hukum dan konsep pelaksanaan KIP
 - b. Pengorganisasian atau mengorganisir perangkat kerjanya agar konsep dan strategi komunikasi yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan efisien,
 - c. Pelaksanaan atau implementasi UU KIP dalam aspek pelayanan informasi publik: publikasi informasi proaktif melalui multimedia, dan Publikasi informasi proaktif melalui tatap muka.
2. Faktor penghambat Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik antara lain adalah:
 - a. Adanya kecenderungan subjektivitas para pejabat PPID pada tata cara penolakan permintaan informasi serta penetapan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses publik.

- b. Praktik permintaan dan pelayanan informasi belum sampai pada level kesadaran terhadap adanya hak publik untuk mendapatkan informasi. Permintaan informasi atau pelayanan cenderung masih dalam kerangka pekerjaan.

3. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi sebagai sumbang saran yang perlu ditindaklanjuti untuk pengembangan aspek keilmuan dan pada level praktis.

1. Salah satu proses yang menunjang Humas Pemerintah Kota Makassar adalah perlunya koordinasi program lintas sektor sesuai ketentuan peraturan pemerintah pusat dan daerah.
2. Perlunya diadakan secara rutin pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bako Humas), dimana akses informasi yang dibutuhkan oleh pejabat Humas, PPID serta seluruh elemen masyarakat dapat diperoleh dari pertemuan tersebut.
3. Penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti lainnya guna kesinambungan kajian tentang peran Humas Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. *Strategi Komunikasi; Sebuah Pengantar Ringkas*. Cet. 3; Bandung: Armico, 1984.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya*. Jakarta: Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi, 2012.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Damopolii, Muljono. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Effendy, Onong Uchjana. *Human Relations dan Public Relations*. Jakarta: Mandar Maju, 1993.
- _____. *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek*. Cet. 21; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- _____. *Dinamika Komunikasi*. Cet. 7; Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Cet. 12; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Komunikasi; Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 15; Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet 1; Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 2006.
- _____. *Pengantar Komunikasi Massa*. Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Cet. 2; Jogjakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- _____. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. 6; Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002
- Tike, Arifuddin. *Dasar-Dasar Komunikasi; Suatu Studi dan Aplikasi*. Cet. 1; Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 2009.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press, tth.
- Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Cet.1; Surabaya: Kesindo Utama, 2012
- Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. 3; Jakarta: Grasindo, 2006.

Sumber Online

- Ahmad Sabban, "Efektivitas Komunikasi Perspektif Islam", *Blog Ahmad Sabban*. <http://www.waspadamedan.com>
- Amar Suteja, "Proses Komunikasi Perspektif Hadist", *Blog Amar Suteja*. <http://amarsuteja.blogspot.com>
- Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Makassar, "Portal Resmi Pemerintah Makassar" *Website Resmi Pemerintah Kota Makassar* <http://www.makassarkota.go.id>
- Departemen Hukum dan HAM, "Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010", *Website Resmi Departemen Hukum dan HAM*, <http://www.djpp.depkuham.go.id>
- Departemen Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010", *Website Resmi Departemen Dalam Negeri*, <http://www.depdagri.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika", *Website Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/sambutan>
- Komisi Informasi, "Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010". *Website Resmi Komisi Informasi*, <http://www.komisiinformasi.go.id>
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005.
- Pemerintah Kota Makassar, "Portal Resmi Pemerintah Makassar" *Website Resmi Pemerintah Kota Makassar*, <http://makassar.bpk.go.id>

LAMPIRAN A (Administrasi Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No 36 (0411) 424835, Fax 424836 Samata

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL

Identitas Mahasiswa :

Nama : MUIS
Tempat/Tanggal Lahir : Peawan (Enrekang) 5 Juni 1990
NIM : 50700109044
Jurusan/Semester : Ilmu Komunikasi / IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Muh. Yamin Baru (Bara-Baraiya Timur)

Judul Yang Di Ajukan :

- I. Strategi Komunikasi Biro Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no ? UUD ✓
- II. Pola Komunikasi Politik Calon Legislatif Terhadap Calon Pemilih (Studi Kasus Caleg Partai Politik Golkar dan Demokrat di Kabupaten Enrekang) ✗
- III. Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Tentang Iklan Calon Presiden RI 2014 Pada Tv Swasta Nasional ✗

UUD no 14/7
UUD no 14 Thn 2008 tentang ke-
terbukaan informasi publik
Di tanda tangani pada tgl 30 April 2008

Makassar, Februari 2014

Yang Mengajukan,

...MUIS.....
NIM. 50700109044

Setelah diteliti, judul pada angka romawi () tersebut di atas dinyatakan belum pernah digarap.

Samata, Februari 2014

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Ramsiah Tasruddin, S.Ag, M.Si
NIP. 19740225 2005 01 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus 1 Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
 Kampus 11 Jl. Slt. Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Hal : Permohonan Pengajuan Judul

Makassar, 22 April 2014

Kepada Yang Terhormat

**Pembantu Dekan Bidang Akademik Fak.
 Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin
 Makassar**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.W.b

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan judul kepada bapak dengan judul skripsi:

**“Strategi Komunikasi Biro Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam
 Mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
 Informasi Publik”**

Berdasarkan judul diatas, maka pokok permasalahannya adalah;

1. strategi komunikasi Biro Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik??
2. faktor pendukung dan penghambat Biro Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik?

Demikian permohonan judul skripsi ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.W.b

Diketahui,
 Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Ramsah Tasruddin, Sag.M.si
 NIP. 19710225 200501 2 001

Penulis,

MUIS
 NIM. 50700109044

Disahkan Oleh :

An. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Pembantu Dekan Bidang Akademik UIN Alauddin Makassar

Dr. Nurhidayat M. Said, M.Ag
 NIP.19710415 199603 1 002

Hal : Pengesahan Pembimbing

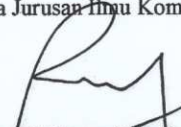
Samata-Gowa, 22 April 2014

Kepada Yang Terhormat
**Bapak Pembantu Dekan Fak. Dakwah dan
 Komunikasi UIN Alauddin Makassar**

Di_
 Tempat

Samata-Gowa

Diketahui,
 Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi


Ramsyah Tasraddin, Sag. M.si
 NIP. 19710225 200501 2 001

Penulis,


MUIS
 NIM. 50700109044

Pembimbing I


Abdul Jalil, S.Ksi, M.Ikom
 NIP. 092307302

Pembimbing II


Dra. Asni Dimereng, M.Si
 NIP. 19641013199403200 2

Disahkan Oleh :
 An. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Pembantu Dekan Bid. Akademik UIN Alauddin Makassar


Dr. Nurhidayat M. Said, M.Ag
 NIP.19710415 199603 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 MEI 2014

TENTANG
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA
A.N. MUIS NIM: 50700109044
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

Ketua : Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si
Sekretaris : Dra. Audah Mannan, M.Ag
Pelaksana : Muh. Rusli, S.Ag., M.Fil.I
Munaqisy I : Mudzhirah Nur Amrullah, S.Sos., M.Si
Munaqisy II : Dra. Irwanti Said, M.Pd
Pembimbing : Abdul Jalil, S.Ksi. M.Ikom.
Pembimbing : Dra. Asni Djamereng, M.Si

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 19 MEI 2014



Dekan,
Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag
NIP. 19540915 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - gowa

Nomor : DU.I/PP.00.9/106/2014
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : *Seminar Draf Mahasiswa*

Samata-Gowa, 19 Mei 2014

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu.
 Di-
 Tempat

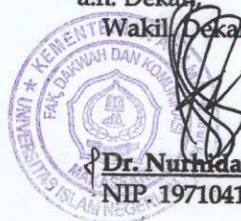
Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Draf Mahasiswa An. Muis NIM: 5070109044 Jurusan Ilmu Komunikasi (Ikom), maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu pada seminar tersebut, Insya Allah pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Mei 2014
Waktu : Pukul, 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. II Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Samata-Gowa

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.Ag
 NIP. 19710415 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Kampus I I: Jl. Sultan Alauddin No. 36 ☎ (0411) 864924, Fax, 864923 Samata-Gowa

Nomor : DU.I/TL.00/2014
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Rangkap
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata-Gowa, 10 September 2014

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala UPT,P2T,BKPM, Prov. Sul-Sel

Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Muis
NIM	: 50700109044
Tingkat/Semester	: XI (Sebelas)
Fakultas/Jurusan	: Dakwah Komunikasi/Ilmu Komunikasi
Alamat	: Jl. Muh. Yamin Baru Lr 24 No. 6 Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Strategi Komunikasi Biro Humas Pemerintah Kota Makassar dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen pembimbing : 1. **Abdul Jalil, S.Ksi., M.Ikom**
2. **Dra. Asni Djamarang, M.Si**

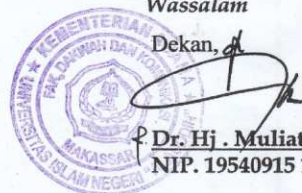
Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari 15 September s/d 15 Oktober 2014.

Demikian, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag
NIP. 19540915 198703 2 001



Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai) Laporan
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu

Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

MAKASSAR 90222

Makassar, 11 September 2014

Kepada

Nomor : 13317/P2T-BKPM/19.36P/09/VII/2014

Lampiran : -

Yth. Walikota Makassar

Perihal : Izin Penelitian

di-
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : DU.I/TL.00/3600/2014 tanggal 10 September 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Muis
 Nomor Pokok : 50700109044
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 36, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**“STRATEGI KOMUNIKASI BIRO HUMAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM
 MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
 INFORMASI PUBLIK”**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 September s/d 15 Oktober 2014

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 Plt. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



H. IRMAN YASIN LIMPO, SH.

Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d

NIP : 19670824 199403 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 316006

MAKASSAR

Makassar, 15 September 2014

Nomor : 489/366.1/HMS/IX/2014
Lamp. :
Perihal : **Penyampaian Penerimaan
Izin penelitian.**

Kepada
Yth. **UIN ALAUDDIN**
Fak.Dakwah & Komunikasi
Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Nhomor : 1331/P2T-BKPM/19.36P/VII/2014 Tanggal 11 September
2014. Perihal : Izin Penelitian, mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Muis
Nomor Pokok	: 50700109044
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Slt. Alauddin No. 36, Makassar
Judul Skripsi	: Strategi Komunikasi Biro Humas Pemerintah Kota Dalam Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pada tanggal	: 15 September 2014 s/d 15 Oktober 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya Bagian
Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar menyetujui kegiatan
yang dimaksud.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
HUMAS
S. Sos., M.Si
Pangkat : Pembina
Nip. : 19801115 201001 2 011

Kartu Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa:

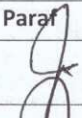

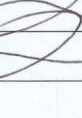
~~Nim~~ Nama : Muis

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Biro Humas Pemerintahan Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pembimbing I : Abdul Jalil, S.Ti, Ikom

Pembimbing II : Dra. Asni Djamereng, M.Si

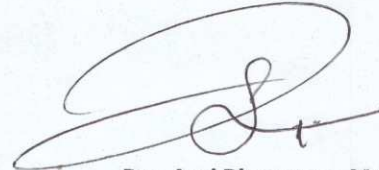
No	Tanggal	Pokok Bahasan	Komentar	Paraf
1.	26-03-2014	Isi Draft	Perbaiki jumlah halaman pra	
2.	15-4-2014	Rumusan masalah	Perbaiki rumusan masalah	
3.	16-4-2014	Strategi komunikasi	Gambarkan komunikasi	
4.				
5.	15/4-2014		Perbaiki detail	
6.	27/4-2014		Perbaiki lagi pra	
7.				
8.				
9.				
10.				

Pembimbing I



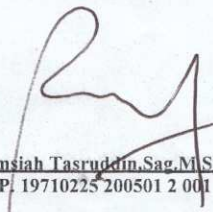
Abdul Jalil, S. Ksi, M.I. Kom
Abdul Jalil, S. Ikom
 NIP. 092307302

Pembimbing II



Dra. Asni Djamereng, M.Si
 NIP. 19641013 199403 2002

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Ramsiah Tasruddin, Sag, M.Si
 NIP. 19710225 200501 2 001

LAMPIRAN B (Pedoman Wawancara)

A. Identitas Informan

1. Informan Kunci (PPID Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar)

Nama : Tenri Ampa
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Magister
Jabatan Struktural : Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar
Alamat/Telp : -

Nama : Khaeruddin
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister
Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat
Alamat/Telp : -

Nama : Ridha Rasyid
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister
Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Dokumentasi
Alamat/Telp : -

Nama : Muhammad Hamzah
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Magister
Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Pemberitaan
Alamat/Telp : -

2. Informan Eksternal (Jurnalis, LSM, Warga Makassar)

Nama : Azis Kuba
 Tempat/Tgl Lahir : -
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : Strata 1
 Profesi/Jabatan : Wartawan Harian Rakyat Sul-Sel
 Alamat/Telp : -

Nama : Didin
 Tempat/Tgl Lahir : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : Strata 1
 Profesi/Jabatan : Harian Tempo
 Alamat/Telp : -

Nama : Wawan
 Tempat/Tgl Lahir : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : Strata 1
 Profesi/Jabatan : Anggota LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
 Alamat/Telp : -

Nama : Sudi
 Tempat/Tgl Lahir : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : Strata 1
 Profesi/Jabatan : Anggota LSM Demokrasi Sul-Sel
 Alamat/Telp : -

B. Teks Wawancara

1. Fokus I (Strategi Komunikasi Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)

- a. Sejauhmana kontribusi peran dan tanggungjawab Humas dalam mekanisme kerja Pemerintah Kota Makassar?
- b. Sebagai agen pembentuk opini publik, langkah apa saja yang dilakukan oleh pranata Humas Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga citra positif dan relasinya dengan lembaga-lembaga lain, media massa, para *stakeholder* dan terutama masyarakat?
- c. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM/pranata Humas Pemerintah Kota Makassar?
- d. Bagaimana program/sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi Humas Pemerintah Kota Makassar?
- e. Bagaimana strategi (*action plan*) yang dilaksanakan Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat?
- f. Bagaimana prosedur operasi standar (SOP) atau tata cara pelayanan informasi kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi?
- g. Sarana dan prasarana apa yang digunakan Humas Pemerintah Kota Makassar dalam hal layanan informasi publik?
- h. Bagaimana strategi (*action plan*) yang dilaksanakan Humas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik?

2. Fokus II (Faktor Penghambat Bagian Humas Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)

- a. Deskripsikan faktor-faktor pendukung bagi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?

- b. Deskripsikan faktor-faktor penghambat bagi Humas Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Item Observasi dan Dokumentasi

1. File profil dan struktur organisasi Humas Pemerintah Kota Makassar
2. File Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) khususnya terkait kehumasan
3. File Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) khususnya terkait kehumasan
4. File hasil riset internal lembaga/Humas Pemerintah Kota Makassar atau lembaga eksternal khususnya terkait kinerja kehumasan
5. Foto kegiatan Humas Pemerintah Kota Makassar khususnya terkait sosialisasi UU KIP dan kegiatan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat
6. Foto sampel publikasi informasi berbasis web/internet, informasi publik tercetak, maupun press release/news dan bentuk informasi publik lainnya.
7. Foto peneliti bersama informan yang diwawancarai

LAMPIRAN C (Dokumentasi Foto/Grafis)



**SUB BAG. PEMBERITAAN
(Administrasi Press Release)**





SUB BAG PENGADUAN MASYARAKAT
(Layanan Melalui SMS Online, Tlp dll)





LAYANAN INFORMASI PUBLIK PROAKTIF (Forum Tatap Muka / Dialog Publik)





DOKUMENTASI WAWANCARA
(Informan Kunci dan Peneliti)



RIWAYAT HIDUP

MUIS, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Ama dan Ramaisa. Penulis lahir pada tanggal 5 Juni 1990 di Enrekang, Sulawesi Selatan. Pendidikan di tempuh di SDN 122 Pangbuluran dan lulus pada Tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya di SMP NEG 3 Baraka dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah ke MA Guppy Gandeng dan lulus di tahun 2009.



Pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan kemudian lulus di tahun 2015. Selama berkuliah, penulis juga aktif menekuni bidang yang relevan dengan latarbelakang akademik (Ilmu Komunikasi) dan organisasi lapangan lainnya.